

Tradisi Ziarah ke Makam Leluhur: Kasus Pejabat Muslim di Madiun (2018-2024)

Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid¹

***Koresponden:**

Email : nginwanun@uinsa.ac.id

Afiliasi:

UIN Sunan Ampel Surabaya

Sejarah Artikel:

Submit: 26 April 2026

Revisi: 28 Mei 2026

Diterima: 6 Juni 2026

Diterbitkan: 20 Juni 2026

Kata Kunci:

Tradisi Ziarah, Makam Leluhur,
Pejabat Muslim, Madiun

Abstrak

Madiun merupakan sebuah wilayah di bagian timur Pulau Jawa, berdiri sekitar 458 tahun lalu dengan nama Purabaya, dan beberapa kali mengalami pergantian fase kerajaan Islam, di antaranya Demak, Pajang, dan Mataram. Selanjutnya beralih ke tangan Pemerintah Hindia Belanda dengan berbagai dinamika politik, hingga puncaknya terpisah menjadi dua pemerintahan, yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Di sisi lain, kegiatan ziarah ke makam para leluhur sebagai tradisi keagamaan yang diajarkan oleh orang-orang zaman dulu, begitu mengakar kuat di kalangan masyarakat muslim Madiun tak terkecuali pejabat pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran pejabat muslim di Madiun dalam melestarikan tradisi ziarah ke makam para leluhur yang mempunyai andil dalam membangun Madiun pada masa lampau. Metode yang digunakan adalah sejarah, adapun tahapannya terdiri atas heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan penulisan. Berikutnya pendekatan sosiologi agama untuk menganalisis hubungan antara agama dengan pejabat pemerintah, serta diperkuat teori peranan sosial oleh Erving Goffman untuk menjelaskan peran pejabat pemerintah di Madiun dalam mengajak masyarakatnya agar ikut melestarikan tradisi ziarah ke makam para leluhur. Selain itu, teori tindakan sosial oleh Max Weber untuk menguraikan beberapa temuan mengenai tujuan melakukan ziarah, seperti mengenang jasa para pemimpin sebelumnya yang telah mengabdikan untuk kemakmuran masyarakat Madiun, serta memohon doa restu agar diberi kelancaran selama mengemban tugas di pemerintahan.

Abstract

Madiun is a region in the eastern part of Java Island, was established around 458 years ago under the name Purabaya, and experienced several phase changes of Islamic empires, including Demak, Pajang, and Mataram. Then, switch power to the Dutch Colonial Government with various political dynamics until the peak was when Madiun was separated into two governments, namely Madiun Regency and Madiun City. On the other hand, the pilgrimage to the ancestors' graves as a religious tradition taught by ancient people was deeply rooted in the Muslim community of Madiun, including government officials. This study aimed to find out the role of Muslim officials in Madiun in preserving the pilgrimage tradition to the graves of the ancestors who had a hand in building Madiun in the past. The method used was history with the following stages: heuristics (source collection), source criticism, interpretation, and writing. The sociology of religion approach was used to analyze the relationship between religion and government officials. Then, it was strengthened by the social role theory initiated by Erving Goffman to explain the role of government officials in Madiun in inviting the community to preserve the pilgrimage tradition to the graves of their ancestors. Furthermore, the theory of social action by Max Weber was useful for explaining some of the findings regarding the purpose of making pilgrimages, including remembering the services of previous leaders who had served for the prosperity of the Madiun people. Lastly, they also asked for blessings so they would be given smooth sailing while carrying out their duties in government.

PENDAHULUAN

Paham “tradisi” menurut kamus sosiologi mencakup dua aspek, yaitu adat istiadat dan kepercayaan yang senantiasa dijaga secara terus-menerus dari nenek moyang (Soekanto, 1993). Sedangkan dalam pengertian ilmu budaya, tradisi dan adat istiadat merupakan satu kesatuan yang sama-sama terlahir oleh manusia, antara lain kebiasaan supranatural yang memiliki nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berlaku, atau kemungkinan kedua, yakni sesuatu yang berasal dari nenek moyang atau leluhur, kemudian diwariskan kepada generasi setelahnya (Darwis, 2017). Bersamaan dengan itu, negara Indonesia yang mempunyai ragam suku bangsa dan budaya, sehingga mampu menghadirkan sejumlah tradisi yang seluruhnya berangkat dari kebiasaan hidup masyarakat setempat, baik berupa petuah, semboyan, maupun model ajaran keagamaan yang tercipta melalui acara



kelahiran, kematian, pernikahan, dan lain sebagainya, yang semua itu telah berlangsung sejak lama (Chairul, 2019).

Penelitian ini mengambil salah satu bentuk tradisi di atas untuk dikaji lebih lanjut, yaitu ajaran keagamaan dari ziarah kubur atau ziarah makam, yang mana belakang ini sering dikaitkan dengan perilaku berbau kemusyrikan, seperti dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Subri (2017), berjudul "Ziarah Makam antara Tradisi dan Praktek Kemusyrikan," menguraikan beberapa temuan mengenai tujuan para peziarah makam, di antaranya berharap supaya dimudahkan dalam mencari rezeki, disembuhkan dari suatu penyakit, ditemukan jodohnya, dan segala hal yang menyangkut urusan duniawi ketimbang mengingat kematian. Selain itu, ada sebagian kalangan yang lebih percaya kepada benda-benda mistis untuk dijadikan tempat mengadu di makam, apalagi benda itu diyakini sebagai peninggalan para wali atau habaib yang memiliki keistimewaan atau kelebihan tertentu. Atas dasar itulah, maka ziarah makam dihukumi syubhat, karena masih terdapat kesamaran antara tradisi keagamaan dengan praktik kemusyrikan (Subri, 2017).

Bertolak belakang dengan kajian dari Jamal Mirdad dkk. (2022), yang mendukung kegiatan tersebut, dalam tulisannya berjudul "Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam yang Dikeramatkan," artikel tersebut mengulas tentang relasi antara agama Islam dengan budaya lokal yang mampu memberikan sumbangsih atas lahirnya tradisi agung, antara lain ziarah ke makam ulama, raja, dan pemimpin terdahulu. Selanjutnya di tengah kemajuan teknologi, kegiatan tersebut dikemas dengan cukup variatif tanpa menghilangkan nuansa sakral pada makam yang dikunjungi, salah satunya rekreasi atau wisata religi dalam rangka mengirimkan doa untuk orang yang mempunyai kontribusi penting semasa hidupnya. Ditambah aktivitas lainnya yang mengandung unsur spiritualitas, antara lain sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Swt., kemudian menjalin silaturahmi antar peserta wisata religi, dan membantu sesama dengan cara bersedekah kepada orang-orang yang meminta di sekitaran kompleks makam (Mirdad dkk., 2022).

Selanjutnya penelitian ini difokuskan pada kasus ziarah makam di wilayah Madiun, berdasarkan bukti-bukti sejarah pada kajian yang dibuat oleh Sri Margana dkk. (2018), dalam bentuk buku berjudul *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, bahwa Madiun atau yang kala itu bernama Purabaya mengawali pemerintahannya di masa Kerajaan Islam Demak sekitar abad ke-16, kemudian melewati fase berikutnya yakni di bawah Pajang dan Mataram yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Sekalipun Mataram terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan setelah adanya Perjanjian Giyanti tahun 1755, yang mana Madiun saat itu di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta, dan peristiwa Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) yang membuat Madiun berada dalam kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda. Sampai akhirnya, Madiun sendiri juga harus terbagi menjadi dua pemerintahan pada tahun 1918, yang terdiri atas Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat dari masyarakatnya untuk terus berusaha mempertahankan adat/kebiasaan lama mereka sewaktu berada di bawah Mataram (Margana dkk., 2018).

Berangkat dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada peran pejabat Muslim di Madiun dalam melestarikan tradisi ziarah makam leluhur pada periode 2018-2023. Penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena tidak hanya membahas ziarah makam dari sisi teologis maupun wisata religi, tetapi juga melihat keterlibatan pejabat Muslim dalam menjaga tradisi keagamaan dan budaya lokal di tengah perubahan sosial masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menunjukkan hubungan antara tradisi keagamaan, identitas lokal, dan peran elite Muslim di Madiun.

KAJIAN PUSTAKA

Berangkat dari pendahuluan di atas, penelitian ini diarahkan untuk melanjutkan kajian dari Jamal Mirdad bersama koleganya, tentang ziarah makam sebagai tradisi keagamaan dan budaya lokal yang patut dilestarikan, bahkan bila perlu dikemas dengan sedemikian rupa agar masyarakat semakin tertarik untuk mengembangkan tradisi tersebut. Di sisi lain, berusaha mengoreksi tulisan dari Subri, sekaligus meluruskan pemahaman dari segelintir orang yang masih menganggap bahwa kegiatan ziarah makam sebagai bentuk kemusyrikan. Setelah itu, difokuskan kajiannya pada kasus di Madiun, yang didasarkan pada perilaku masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat peninggalan para leluhurnya, seperti yang diulas dalam buku Sri Margana beserta tim.

Penelitian ini juga menempatkan pejabat muslim sebagai subjek utama dengan mengambil dua tokoh, di antaranya H. Ahmad Dawami Ragil Saputro (Bupati Madiun periode 2018-2023) dan Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd. (Walikota Madiun periode 2019-2024). Sekaligus menjadi dasar penetapan angka tahun 2018-2024 sebagai batasan penelitian ini, yang coba diuraikan mengenai peran mereka dalam melestarikan tradisi ziarah ke makam para leluhur, khususnya yang telah berjasa atas pembentukan Madiun. Selain itu, guna mengetahui tujuan mereka melakukan ziarah pada saat-saat tertentu, seperti perayaan Hari Jadi Kabupaten dan Kota Madiun.

Di samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan kasus lain di sekitar Madiun, yaitu Ponorogo dalam kegiatan ziarah ke makam leluhur, seperti dalam artikel jurnal berjudul "Tradisi Ziarah Makam Bathara Katong Pendiri Peradaban Islam di Ponorogo: Tinjauan Makna Simbolik," karya Amirul Nur Wahid dkk. (2018), yang menguraikan kebiasaan masyarakatnya ketika berkunjung ke makam Bathara Katong, yaitu Bupati Ponorogo pertama jelang akhir abad ke-15, sekaligus tokoh yang berpengaruh terhadap kemajuan agama Islam di sana, sehingga beliau sangat dihormati (Wahid dkk., 2018). Sementara di Madiun juga terdapat tokoh yang disegani bernama Pangeran Timur atau Ronggo Jumenon, seorang Bupati Madiun pertama pada tahun 1568-1586 (Margana dkk., 2018), yang mana makam beliau hingga kini selalu ramai dikunjungi para peziarah, termasuk dari kalangan pejabat pemerintahan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin terdahulu mereka.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode historis atau sejarah yang tahapannya meliputi heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan historiografi atau penulisan sejarah (Madjid & Wahyudhi, 2014). Pada tahap heuristik, sumber penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari arsip kolonial berbahasa Belanda yang membahas Madiun pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan situs delpher.nl, dokumentasi kunjungan pejabat Muslim Madiun ke makam leluhur dari situs resmi pemerintah daerah, serta hasil wawancara lapangan dengan juru kunci makam. Adapun sumber sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai sejarah Madiun, tradisi ziarah makam, dan hubungan agama dengan budaya lokal yang diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Kabupaten Madiun, serta *Google Scholar*.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan field research melalui observasi dan wawancara di Kompleks Makam Kuno Kuncen dan Kompleks Makam Kuno Taman di Kota Madiun. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap Siamunir (72 tahun) selaku juru kunci makam, dengan fokus pertanyaan mengenai sejarah makam, tradisi ziarah, serta keterlibatan pejabat Muslim dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas peziarah, kondisi lingkungan makam, serta bentuk-bentuk tradisi keagamaan yang masih berlangsung di lokasi penelitian.

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara, arsip, dokumentasi pemerintah, dan literatur akademik agar diperoleh informasi yang saling mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya seluruh sumber diseleksi menggunakan kritik internal dan eksternal untuk menilai keaslian, kredibilitas, serta relevansi sumber sebelum memasuki tahap interpretasi. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama untuk memahami hubungan antara pejabat Muslim, masyarakat, dan pelestarian tradisi ziarah makam di Madiun (Tharaba, 2016).

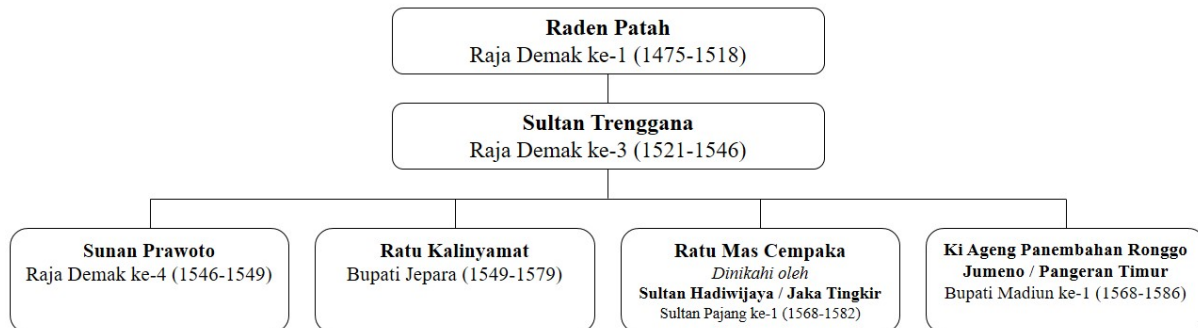
Tahap akhir penelitian adalah penulisan sejarah dengan memanfaatkan teori peranan sosial (*social role*) dari Erving Goffman mengenai "presentasi diri" individu atau kelompok di tengah masyarakat (Burke, 1993), serta teori tindakan sosial (*social action*) Max Weber untuk menganalisis motif dan tujuan tindakan pejabat Muslim dalam melestarikan tradisi ziarah makam leluhur di Madiun (Weber, 1947)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Purabaya Menjadi Madiun: Membangun Suatu Peradaban

Purabaya (ejaan lama: *Poerabaja*) merupakan nama wilayah sebelum Madiun yang sekarang ini tergabung dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan langsung dengan lima kabupaten, antara lain Bojonegoro di sebelah utara, Nganjuk di sebelah timur, Magetan dan Ngawi di sebelah barat, dan Ponorogo di sebelah selatan (Mahamid, 2022). Purabaya sebagai wilayah cikal bakal Madiun, dibentuk jelang akhir masa kekuasaan Kesultanan Demak yang saat itu diperintah oleh Sunan Prawoto (1546-1549), sebelum beralih kekuasaan ke tangan Kesultanan Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya (1568-1582) atau dikenal dengan nama Jaka Tingkir (Al-Fakir, 2015). Bersamaan dengan itu, Pangeran Timur diangkat sebagai Adipati atau Bupati Purabaya, beliau merupakan putra bungsu dari Sultan Trenggana (Demak) yang menjabat pada tahun 1521-1546, sekaligus adik ipar dari Sultan Hadiwijaya (Pajang) yang menikah dengan putri ketiga Sultan Trenggana, yakni Ratu Mas Cempaka. Hingga kini, Pangeran Timur yang bergelar Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumenno ditetapkan sebagai Bupati Madiun pertama yang menjabat pada tahun 1568 hingga 1586 (Margana dkk., 2018).

Bagan 1. Silsilah Keturunan Raja-raja Islam Demak sampai ke Bupati Madiun Pertama (Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumenno / Pangeran Timur)



Sumber: Diolah dari Al-Fakir (2015) dan Olthof (2017)

Mengenai Hari Jadi Purabaya, berdasarkan perhitungan kalender Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung sejak tahun 1555, diterangkan bahwa tanggal satu bulan Muharram atau dalam istilah Jawa disebut bulan Sura, terjadi pada hari Jum'at Legi. Di samping itu, bulan Sura dianggap sebagai bulan kebesaran bagi Raja-raja Islam Jawa untuk menggelar hajatan besar, salah satunya mendirikan suatu daerah. Hal tersebut kemudian dijadikan tolak ukur dalam pembentukan Purabaya pada bulan Sura (Muharram) yang secara kebetulan juga terjadi pada malam Jum'at Legi di hari ke-15 tahun Jawa 1487 atau bertepatan pada tanggal 18 Juli 1568 Masehi. Sampai sekarang, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Madiun, dikarenakan Kabupaten Madiun sendiri merupakan kelanjutan dari pemerintahan Purabaya sebelum berganti nama (Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, 1980).

Mengenai Hari Jadi Purabaya, berdasarkan perhitungan kalender Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung sejak tahun 1555, diterangkan bahwa tanggal satu bulan Muharram atau dalam istilah Jawa disebut bulan Sura, terjadi pada hari Jum'at Legi. Di samping itu, bulan Sura dianggap sebagai bulan kebesaran bagi Raja-raja Islam Jawa untuk menggelar hajatan besar, salah satunya mendirikan suatu daerah. Hal tersebut kemudian dijadikan tolak ukur dalam pembentukan Purabaya pada bulan Sura (Muharram) yang secara kebetulan juga terjadi pada malam Jum'at Legi di hari ke-15 tahun Jawa 1487 atau bertepatan pada tanggal 18 Juli 1568 Masehi. Sampai sekarang, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Madiun, dikarenakan Kabupaten Madiun sendiri merupakan kelanjutan dari pemerintahan Purabaya sebelum berganti nama (Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, 1980).

Meski demikian, sebelum kedatangan kesultanan-kesultanan Islam di atas, terdapat sejumlah kerajaan bercorak Hindu-Budha yang pernah mendirikan pemerintahan di wilayah yang kini bernama Madiun, di antaranya Kerajaan Singhasari dan Gelanggalang pada abad ke-12-13 M. Dibuktikan dengan temuan arkeologi di Situs Ngurawan, Dolopo, Madiun, berupa sisa-sisa bangunan dua kerajaan tersebut dan sudah diteliti oleh Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Lalu, berlanjut ke Kerajaan Majapahit yang berkuasa pada abad ke-14-15 M, juga telah ditemukan peninggalannya di Wungu, Madiun, berupa Punden Lambang Kuning (Mahamid, 2022). Namun keberadaan mereka tidak

dianggap sebagai awal mula berdirinya pemerintahan di Madiun. Maka timbulah pertanyaan, seperti mungkinkah karena ketiganya bukan termasuk kerajaan yang bernuansakan Islam, sehingga orang-orang Madiun yang mayoritas muslim enggan mengakuinya sebagai pencetus Madiun. Berbanding terbalik ketika Kesultanan Islam Demak mulai berkuasa di Jawa, khususnya Madiun yang kemudian dianggap sebagai awal berdirinya Kabupaten Madiun, meskipun namanya waktu itu adalah Purabaya (Mahamid, 2023).

Adapun pusat pemerintahan Purabaya telah berpindah sebanyak tiga kali, antara lain di Ngurawan (sekarang Dolopo, Kabupaten Madiun) ketika masih berada di bawah naungan Kesultanan Demak. Selanjutnya berpindah ke Sogaten (sekarang masuk wilayah Kota Madiun) di awal pemerintahan Kesultanan Pajang, dan setelah Ronggo Jumeno diangkat sebagai Bupati Purabaya pertama, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Sogaten ke Kuncen yang kini dijadikan nama kelurahan di Kecamatan Taman, Kota Madiun. Tak hanya itu, beliau juga mendirikan sebuah masjid di dekat pusat pemerintahan Purabaya, dalam rangka Islamisasi atau menjadi tempat penyebaran agama Islam di wilayah Madiun dan sekitarnya (Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, 1980). Pada tahun 1970, masjid tersebut kemudian diberi nama Masjid Nur Hidayatullah, akan tetapi nama yang paling dikenal masyarakat Madiun hingga sekarang adalah Masjid Kuno Kuncen yang kaya akan nilai historisnya. Di sebelah masjid terdapat makam Ronggo Jumeno sebagai pendiri sekaligus bupati pertama Madiun dan beberapa Bupati Madiun setelahnya (Triatmoko & Wibowo, 2012).

Pasca runtuhnya Kesultanan Pajang di akhir abad ke-16, Purabaya kemudian berusaha dikuasai oleh Kesultanan Mataram, hingga terjadi pemberontakan antara rakyat Purabaya dengan Sutawijaya atau Panembahan Senopati dari Mataram. Di tengah konflik tersebut Ronggo Jumeno menyerahkan pemerintahan Purabaya kepada putrinya, yaitu Retno Jumilah sebagai Bupati Purabaya kedua yang menjabat tahun 1586-1590, bergelar Raden Ajeng Ayu Retno Jumilah (Olthof, 2017). Peristiwa itu sekaligus menjadi awal pergantian nama dari Purabaya menjadi Madiun, setelah kekalahan pasukan Purabaya yang dipimpin Retno Jumilah melawan pasukan Mataram di bawah Sutawijaya. Diperkirakan lokasinya berada di sendang dekat Masjid Kuno Kuncen, terjadi pada hari Jum'at Legi, tanggal 21 bulan Sura tahun Jawa 1510 yang bertepatan pada tanggal 16 November 1590 Masehi. Adapun nama Madiun sendiri berasal dari dua kata, yaitu "mbedi" yang berarti sendang dan "ayun" yang artinya perang, sehingga apabila digabung menjadi "Mbediyun" atau Madiun untuk ejaan sekarang yang memiliki arti perang di sekitar sendang sebagai awal penamaan Madiun (Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, 1980).

Terhitung sejak peristiwa tersebut, Madiun secara yurisdiksi formal berada di bawah pemerintahan Kesultanan Mataram, yakni menjadi bagian dari Mancanegara Timur bersama sejumlah kabupaten lainnya. Oleh karena itu, Bupati Madiun yang menjabat setelah Retno Jumilah, seperti Raden Mas Rangsang (1590-1591), Raden Mas Sumekar (1591-1595), Raden Mas Julig Peringgoloyo (1595-1601), dan seterusnya wajib melaporkan hasil kinerjanya kepada Raja Mataram yang tengah berkuasa. Hal itu terus berlanjut bahkan setelah pecahnya Mataram menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, pasca dilakukannya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Madiun sendiri berada di bawah Kesultanan Yogyakarta dan masih menggunakan aturan yang sama, yakni setiap bupati bertanggung jawab kepada Sultan Yogyakarta yang bertindak sebagai Raja Jawa (Margana dkk., 2018).

Aturan tersebut berakhir setelah takluknya Dinasti Mataram dalam pertempuran besar yang dinamakan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), hingga penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pasukan Belanda, pada tanggal 28 Maret 1830. Hal itu membuat seluruh kabupaten Mancanegara Timur, termasuk Madiun jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (Adam, 1941). Setelah itu, didirikan wilayah administrasi baru dengan nama Karesidenan Madiun yang beranggotakan Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Waktu itu Madiun ditunjuk sebagai ibukota dan pusat pemerintahan, lalu setiap bupati diharuskan mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal melalui Residen, yakni pejabat kolonial yang mengepalai karesidenan (Ham, 2019).

Selama berada di bawah kendali Pemerintah Hindia Belanda, Madiun telah melewati berbagai dinamika politik dan kekuasaan, antara lain Sistem Tanam Paksa, Ekonomi Liberal atau Kapitalis, dan Politik Etis (Mahamid, 2022, h. 163). Puncaknya ialah ketika memasuki era desentralisasi wilayah yang mana terdapat upaya segregasi atau pemisahan strata sosial oleh pemerintah Belanda, antara bangsa Cina dan Eropa yang bermukim di sekitaran rumah dinas Residen Madiun dengan orang-orang pribumi yang tinggal di pedesaan atau kabupaten. Selanjutnya muncul kebijakan kolonial yang diatur dalam (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië Nomor 326 Tahun 1918*) tentang pembentukan *Staats Gementee Madioen* (Kota Praja Madiun) pada tanggal 20 Juni 1918, yang sampai saat ini dirayakan sebagai Hari

Jadi Kota Madiun. Dengan demikian, Madiun memiliki tiga kedudukan sekaligus, di antaranya sebagai ibukota Karesidenan Madiun, ibukota Kabupaten Madiun, dan ibukota Kota Madiun (Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, 1980).

Sistem karesidenan yang berjalan selama lebih dari satu abad di Madiun, resmi dihapuskan menyusul kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 8 Agustus 1950 melalui (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950*) tentang penghapusan sistem karesidenan, dan penetapan Provinsi Jawa Timur yang beranggotakan 29 kabupaten dan 9 kota, termasuk dua di antaranya adalah Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Sementara itu, Kabupaten Madiun telah memindahkan ibukota dan pusat pemerintahannya ke wilayah Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun terhitung sejak tanggal 6 Juni 2010, berdasarkan (*Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010*).

Sejak itulah Madiun hanya mempunyai satu kedudukan, yakni ibukota Kota Madiun. Walaupun demikian, sejarah Kota Madiun tidak bisa terlepas dari Kabupaten Madiun. Dikarenakan ada beberapa aset yang berlokasi di Kota Madiun, namun masih dipertahankan sebagai milik Pemerintah Kabupaten Madiun, salah satunya bangunan pendopo lama yang terletak di utara Alun-alun Kota Madiun. Selain itu, banyak ditemukan peninggalan situs bersejarah di Kota Madiun, khususnya kompleks makam para leluhur Madiun, baik yang berada di sekitar Masjid Kuno Kuncen maupun Masjid Kuno Taman, Kota Madiun.

Ziarah Makam sebagai Tradisi Keagamaan dan Budaya Lokal

Menurut bahasa, ziarah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni “*zāra-yazūru-ziyārah*” artinya menziarahi atau mengunjungi. Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan berkunjung ke suatu tempat yang dianggap keramat atau mulia, salah satunya ialah kuburan atau makam. Penyebutan keduanya dapat dibedakan dari status orang yang telah meninggal di mata masyarakat, yakni kuburan apabila yang meninggal merupakan masyarakat biasa, sedangkan jika yang meninggal adalah wali atau orang-orang yang disucikan, termasuk pahlawan yang memiliki jasa-jasa tertentu, maka disebut makam. Namun yang jelas, setiap individu yang berkunjung ke sana memiliki tujuan tertentu, seperti berziarah dan berkiriman doa (Ma'rif, 2021; Latif & Usman, 2021).

Mengacu hal tersebut, ziarah makam memiliki arti spesifik yaitu kegiatan mengunjungi makam atau kuburan dalam rangka mendoakan para penghuni makam dan mengambil pelajaran dari keadaan mereka yang sudah meninggal dunia (Sylviana, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam isi kandungan Al-Qur'an, Surah At-Takatsur ayat 1-2 tentang larangan untuk mengejar dunia secara berlebihan atau bermegah-megahan, mengingat kelak setiap manusia akan masuk ke liang kubur (meninggal). Hal itula yang menjadi landasan bagi kaum muslimin untuk melakukan ziarah ke makam orang-orang yang sudah meninggal (Haryadi & Safinah, 2020).

أَهْلِكُمُ النَّكَاتُ ۝ ١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ ٢

“Bermegah-megahan dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu. Sampai kamu masuk dalam kubur.” (Q.S. At-Takatsur[102]: 1-2).

Walaupun demikian, ziarah makam yang dilakukan saat ini masih saja menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat muslim, terutama perbedaan *khilafiyah* mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan kegiatan tersebut. Pendapat pertama membolehkan sebab ziarah makam mempunyai unsur-unsur spiritual dan religiusitas yang memberikan efek positif tertentu kepada pelaku ziarah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun di sisi lain ada sebagian yang masih menganggap bahwa ziarah makam tidak memiliki sumber hukum yang jelas untuk dijadikan sebagai *hujjah* (alasan, bukti kuat) terkait kebolehan melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan ironisnya sampai ada kelompok tertentu yang dengan sengaja mengkafirkan saudaranya sesama muslim karena hal sepele tersebut. Padahal jika dilakukan pengkajian mendalam terhadap hadis, yang merupakan sumber hukum umat Islam kedua setelah Al-Qur'an, banyak ditemukan perintah ataupun anjuran terkait pelaksanaan ziarah makam, salah satunya hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Al-Ayyubi & Munif, 2021).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُرُّوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْتَ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam berziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, sehingga menangis pula-lah orang-orang yang berada di sekitar beliau. Kemudian beliau bersabda: “Aku meminta izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan oleh-Nya. Maka akupun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, akupun diizinkan.” Oleh

karena itu, berziarah-kuburlah, karena (ziarah kubur) dapat mengingatkan engkau akan kematian. (H.R. Muslim).

Meskipun pada hadis yang lain, Rasulullah saw. pernah melarang ziarah kubur, karena dalam konteks sosiologi agama masyarakat Arab waktu itu didominasi kepercayaan kepada Dewa, sehingga dianggap masih lemah keimanannya. Seiring berjalannya waktu, keimanan dan akidah umat muslim semakin kuat dan tidak lagi dikhawatirkan melakukan kemusyrikan. Maka sejak itu ziarah kubur menjadi dibolehkan, bahkan dianjurkan sebagai sarana untuk mengingatkan pada kematian dan akhirat (Winoto & Amaliyah, 2022).

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ هَيِّئْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ
لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ

Dari Buraidah ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya pernah melarang berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka, sekarang berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. (H.R. Tirmidzi).

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, ziarah makam kini telah berkembang menjadi salah satu tradisi keagamaan yang memiliki relevansi dengan budaya lokal, terutama budaya Jawa yang mana orang-orangnya sangat lekat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu meyakini keberadaan roh pada suatu objek. Dalam hal ini, roh manusia yang sudah meninggal dunia, sampai akhirnya Islam datang untuk merubah kebiasaan mereka tersebut, tanpa harus meninggalkan budaya sebelumnya, seperti menjadikan kegiatan ziarah dalam Islam sebagai ajaran tentang kematian. Sementara bagi masyarakat suku Jawa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan leluhur, sehingga apabila keduanya diakulturasikan (digabungkan) antara ajaran Islam dan budaya Jawa, maka ziarah makam di samping sebagai pengingat kematian, juga menjadi sarana untuk menyampaikan doa-doa terbaik kepada leluhur dengan maksud agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Sylviana, 2018).

Dalam praktik ziarah makam di kalangan masyarakat muslim Jawa, umumnya memiliki waktu pelaksanaan tertentu, antara lain pada bulan Muharram (Sura), Sya'ban, Rabi'ul Awal (Maulid Nabi), satu hari jelang bulan Ramadan dan Syawal, dan masih banyak lagi. Bagi masyarakat Jawa, ziarah makam tidak hanya bertujuan untuk mendoakan si mayit/jenazah, melainkan *tawasul* (berdoa lewat perantara) jenazah yang didoakan, apabila makam tersebut berisi orang-orang saleh atau wali. Tujuan lainnya adalah *tabarruk* atau mencari keberkahan langsung dari Allah Swt. (Latif & Usman, 2021).

Tak hanya itu, dari segi pelaksanaannya juga mempunyai berbagai macam versi, di antaranya *nyekar* dan *nyadran*. Keduanya termasuk tradisi dan kebudayaan yang hingga kini masih sering dilakukan oleh masyarakat Jawa. Adapun istilah *nyekar* berasal dari kata "*sekar*" yang artinya kembang atau bunga, dalam hal ini peziarah mendatangi makam dengan membawa bunga, lalu ditaburkan di atas makam para leluhur mereka. Sementara *nyadran* merupakan kegiatan membersihkan makam yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga, dan puncaknya adalah mempersiapkan sesaji untuk didoakan. Lalu, selebihnya dibagikan kepada pengunjung atau masyarakat sekitar di area makam dalam rangka sedekah, dengan harapan sedekah tersebut mendapatkan pahala yang nantinya sampai pada leluhur (Kastolani & Yusof, 2016).

Adapun penyempurnaan dari tradisi ziarah makam, masyarakat muslim di Jawa mengadakan kegiatan yang diberi istilah *kenduren* atau *slameten*. Kegiatan tersebut memiliki tujuan sama, yaitu mendoakan arwah yang meninggal agar senantiasa dalam lindungan Allah Swt. Letak perbedaannya apabila ziarah makam dilakukan langsung di tempat peristirahatan, sedangkan *kenduren* atau *slametan* umumnya diselenggarakan di rumah ahli keluarga yang mempunyai hajat kirim doa kepada leluhur mereka, kemudian ditambahkan bacaan Surah Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh seorang pemuka agama atau kiai (Sari, 2016). *Kenduren* atau *slametan* termasuk dalam tradisi kearian lokal yang dipertahankan, bahkan di masa penjajahan Belanda sekalipun tradisi tersebut masih berlangsung, dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Berikutnya sang pemilik hajat memberi sedekah *berkat*, yaitu makanan yang sudah dibacakan kalimat doa kepada tamu undangan, biasanya terdiri atas makanan pokok (nasi) yang dibungkus dengan daun pisang. Lalu, dihidangkan bersama sayuran dan lauk pauk, seperti tahu, tempe, ikan, daging ayam, dan lain sebagainya, serta ditambahkan makanan penutup berupa *epëm* (sejenis kue kering) dan tape ketan (Mayer & Moll, 1909).

Seiring dengan kemajuan zaman, ziarah makam kemudian dikembangkan menjadi wisata religi, dimaknai sebagai kegiatan berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki kesakralan, di antaranya

makam dan masjid bersejarah ataupun dalam rangka mengikuti acara tertentu, seperti pengajian, semaian Al-Qur'an, zikir, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya wisata religi tidak sebatas untuk senang-senang atau mencari hiburan semata, akan tetapi hakikat utamanya ialah menambah pengetahuan tentang kebesaran dari ciptaan Allah Swt., yang disaksikan secara langsung selama perjalanan. Oleh karena itu, wisata religi, khususnya ziarah ke makam orang-orang yang disucikan (wali) mempunyai manfaat penting bagi para peserta selepas mengikutinya, antara lain untuk meningkatkan spiritualitas kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan menjadikannya lebih taat dalam beribadah atau mengabdikan kepada Allah Swt., yang secara konsisten mampu menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, tertanam pula dalam diri mereka nilai-nilai yang menjadi dasar umat Islam dalam melaksanakan ibadah yang meliputi rukun iman, rukun Islam, dan ihsan (Sari dkk., 2018).

Pelestarian Tradisi Ziarah ke Makam Para Leluhur oleh Pejabat Muslim Madiun

Pada kasus Madiun, kegiatan wisata religi khususnya ziarah makam, sekarang ini telah menjadi suatu tradisi keagamaan dan budaya lokal yang seakan tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat muslim di sana. Tidak terkecuali dari kalangan pejabat pemerintahannya, seperti Bupati Madiun, Walikota Madiun, wakil dan beserta jajarannya. Akan tetapi, kegiatan utama mereka adalah ziarah ke makam para pendiri atau leluhur Madiun, yang hingga kini terus diagendakan pada hari-hari tertentu. Tercatat ada tiga lokasi yang sampai sekarang diyakini keberadaannya sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang telah berjasa dalam membangun Purabaya hingga menjadi Madiun, antara lain Kompleks Makam Kuno Kuncen dan Kompleks Makam Kuno Taman di Kota Madiun, serta Makam Raja-raja Mataram di Kotagede, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada konteks ini, tradisi ziarah yang dilakukan oleh pejabat Muslim Madiun tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas keagamaan semata, tetapi juga sebagai bentuk "presentasi diri" sebagaimana dikemukakan oleh Erving Goffman. Kehadiran bupati, wali kota, maupun pejabat daerah lainnya di makam para leluhur Madiun merupakan tindakan simbolik yang menunjukkan identitas mereka sebagai pemimpin yang dekat dengan nilai religius dan budaya lokal masyarakat. Melalui kegiatan ziarah, para pejabat berupaya menampilkan citra sebagai penerus tradisi para pendahulu, sekaligus menjaga hubungan emosional dengan masyarakat yang masih memegang kuat tradisi keagamaan tersebut. Oleh karena itu, ziarah makam juga memiliki fungsi sosial dan simbolik sebagai media legitimasi moral dan kultural bagi para pemimpin daerah.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, aktivitas ziarah para pejabat Muslim di Madiun dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional dan rasional bernilai. Disebut tindakan tradisional karena kegiatan tersebut dilakukan secara turun-temurun sebagai bagian dari adat dan budaya lokal masyarakat Madiun. Sementara itu, tindakan rasional bernilai tampak dari adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yakni menjaga warisan budaya Islam lokal, menghormati jasa leluhur, serta memperkuat harmonisasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, tradisi ziarah makam tidak hanya memperlihatkan relasi antara agama dan budaya, tetapi juga menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik keagamaan dengan kekuasaan lokal di Madiun.

Ulasan pertama adalah mengenai makam pendiri sekaligus Bupati Madiun pertama, yaitu Ki Ageng Panembahan Ronggo Jemeno (Pangeran Timur) yang memerintah pada tahun 1568-1586. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa waktu itu Ronggo Jemeno mendirikan pusat pemerintahan Purabaya atau Madiun di Kuncen, yang sekarang ini masuk wilayah administrasi Kota Madiun (Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, 1980). Nama Kuncen sendiri merupakan singkatan dari kata "*kekancingan*", yaitu istilah untuk tanah pemberian dari institusi atau kesultanan Islam yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan di tingkat kadipaten (kabupaten). Ketika Madiun berada di bawah naungan Kesultanan Mataram Islam, nama Kuncen tetap dipertahankan, bahkan mendapat izin legalitas yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh seorang *Pepatih Dalem* (Raja Mataram). Dikarenakan tokoh penting Madiun banyak yang dimakamkan di sana, termasuk salah satunya Ronggo Jemeno (Dhevi & Widiharto, 2019).

Meski demikian, keberadaan makam Ronggo Jemeno di kompleks makam kuno Kuncen sampai sekarang ini masih diperdebatkan. Sebagian orang percaya bahwa yang dimakamkan di situ adalah jasad asli dari sang *founder* Madiun, namun adapula pendapat yang mengatakan bahwa beliau tidak benar-benar dimakamkan di sana, melainkan hanya sebuah petilasannya saja yang berfungsi sebagai "*memorial building*" atau simbol untuk mengingat suatu peristiwa sejarah di tempat yang pernah disinggahi tokoh penting (Huda, 2016). Pendapat tersebut didasarkan pada temuan dalam beberapa sumber sejarah sekunder, salah satunya tulisan H.J. de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaue (1974), menyebutkan bahwa ketika Madiun dalam situasi konflik menghadapi Panembahan Senopati dari Mataram tahun 1586, Ronggo Jemeno waktu itu melarikan diri bersama salah seorang putranya ke

Japan (sekarang wilayah Mojokerto, Jawa Timur). Selanjutnya Madiun diserahkan kepada putrinya, Retno Jumilah (Graaf & Pigeaue, 1989). Dari peristiwa tersebut munculah pertanyaan tentang bagaimana proses kembalinya Ronggo Jumeno ke Kuncen.

Foto 1. Kompleks Makam Kuno Kuncen di Kota Madiun



Sumber: Koleksi Foto Penulis (2020)

Sementara itu, Siamunir yang bertugas sebagai juru kunci makam kuno Kuncen sejak tahun 1990, membenarkan bahwa kemungkinan yang dimakamkan di situ bukan jasad dari Ronggo Jumeno, tetapi hanya petilasan saja, karena beliau hidup jauh di masa Kesultanan Demak sekitar abad ke-16, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di Kuncen ini. Ditambah lagi ketidakadanya sumber sejarah primer yang kuat dan bisa dijadikan rujukan. Selain makam, terdapat pula Masjid Kuno Kuncen yang diperkirakan sudah ada sejak masa Ronggo Jumeno, namun kapan didirikannya belum dapat diketahui pasti, termasuk benda peninggalan/artefak, salah satunya guci tempat mengambil air wudu. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat muslim di Madiun untuk melakukan kunjungan/ziarah ke makam leluhurnya (Siamunir, 2020).

Kunjungan tersebut juga dilakukan serentak oleh kalangan pejabat pemerintahan, terbaru ini dilakukan oleh Bupati Madiun 2018-2023, Ahmad Dawami Ragil Saputro, bersama wakilnya, Hari Wuryanto, dan para staf yang ikut berziarah ke beberapa makam Bupati Madiun terdahulu pada tanggal 13 Juli 2020, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Madiun yang saat itu tengah berumur 452 tahun. Adapun lokasi pertama yang dikunjungi adalah makam kuno Kuncen, di sana Bupati dan Wakil Bupati beserta rombongan membaca kalimat tahlil dan doa-doa di pelataran makam. Setelah itu, dilakukan tabur bunga di atas makam dan dilanjut dengan makan bersama seluruh yang hadir dalam rangkaian acara tersebut (Pemerintah Kabupaten Madiun, 2020).

Ziarah ke makam leluhur tentunya memiliki berbagai macam tujuan, di antaranya untuk melestarikan salah satu tradisi keagamaan, sekaligus mengenang jasa para pemimpin yang telah lebih dulu mengabdikan diri untuk kemakmuran masyarakat khususnya di Madiun. Dengan demikian, tujuan utamanya ialah supaya masyarakat semakin mencintai para leluhurnya dan tidak melupakan kontribusi mereka dalam membangun Madiun. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bupati Madiun saat itu, yakni "*mikul dhuwur mendhem jero*", bermakna bahwa setiap perilaku baik yang ditinggalkan para pemimpin sebelumnya sebisa mungkin harus ditiru dan dilanjutkan. Selain itu, adapula tujuan khusus bagi pejabat pemerintahan, yaitu supaya ke depan senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya (Pemerintah Kabupaten Madiun, 2020). Ternyata, hal serupa juga pernah dilakukan oleh para pejabat Madiun sebelumnya, akan tetapi dilaksanakannya beberapa hari sebelum pelantikan, baik itu calon Bupati, Walikota, maupun pejabat lainnya yang beragama Islam. Dengan tujuan memohon doa restu kepada leluhurnya sebelum menduduki kursi pemerintahan (Siamunir, 2020).

Foto 2. Kegiatan Ziarah ke Makam Leluhur oleh Bupati Madiun



Sumber: Pemerintah Kabupaten Madiun (2020)

Makam Ronggo Jumeno sendiri telah beberapa kali direnovasi terutama pada bangunan makamnya yang kini dipasang simbol Keraton Mataram Islam. Selain itu, terdapat makam Bupati keenam sampai kesembilan yang menjabat pada masa Mataram Islam, dan bergelar Mangkunegoro I-IV. Oleh sebab itulah, di samping makam mereka juga terdapat beberapa makam pengikutnya dari Mataram, termasuk batu nisan yang digunakan kebanyakan adalah batu-batu andesit dari gunung, tepatnya diambil dari Gunung Merapi yang sangat disakralkan oleh penduduk Mataram. Hanya saja, dari pihak Dinas Kebudayaan Kota Madiun tidak mengizinkan keempat makam tersebut dipugar, dengan alasan ingin menjaga nilai-nilai sejarahnya agar tidak hilang (Dhevi & Widiharto, 2019).

Berikut adalah daftar nama Bupati Madiun terdahulu yang dimakamkan di Kompleks Makam Kuno Kuncen, Kota Madiun.

Tabel 1. Keberadaan Makam Leluhur Madiun di Kompleks Makam Kuno Kuncen

No	Nama	Keterangan
1.	Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno / Pangeran Timur	Bupati Madiun ke-1 (1568-1586)
2.	Raden Mas Bagus Petak / Mangkunegoro I	Bupati Madiun ke-6 (1601-1613)
3.	Adipati Martoloyo / Mangkunegoro II	Bupati Madiun ke-7 (1613-1645)
4.	Raden Aryo Adipati Balitar / Kyai Irodikromo / Mangkunegoro III	Bupati Madiun ke-8 (1645-1677)
5.	Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel / Mangkunegoro IV	Bupati Madiun ke-9 (1677-1703)

Sumber: Siamunir (2020)

Setelah menggelar acara ziarah ke makam yang ada di Kuncen, para pejabat biasanya langsung melanjutkan perjalanan ke lokasi kedua dari makam Bupati Madiun lainnya yang berada di Kompleks Makam Kuno Taman, Kota Madiun. Terdapat 11 mantan Bupati Madiun yang dimakamkan di sana, sebagai berikut:

Tabel 2. Keberadaan Makam Leluhur Madiun di Kompleks Makam Kuno Taman

No	Nama	Keterangan
1.	Raden Ronggo Prawiro Sentiko / Raden Ronggo Prawirodirjo I	Bupati Madiun ke-14 (1755-1784)
2.	Raden Ronggo Prawirodirjo II	Bupati Madiun ke-15 (1784-1797).
3.	Pangeran Dipokusumo	Bupati Madiun ke-17 (1810-1820)
4.	Ronggo Prawirodiningrat	Bupati Madiun ke-19 (1822-1861)
5.	Raden Ronggo Ariyo Notoningrat / Kanjeng Bagus	Bupati Madiun ke-20 (1861-1869)
6.	Raden Mas Mas Tumenggung Adipati Sosronegoro	Bupati Madiun ke-21 (1869-1879)
7.	Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat	Bupati Madiun ke-22 (1879-1885)

8.	Raden Aryo Adipati Brotodiningrat	Bupati Madiun ke-23 (1885-1900)
9.	Raden Tumenggung Koesnodiningrat	Bupati Madiun ke-24 (1900-1929)
10.	Raden Mas Adipati Koesmen	Bupati Madiun ke-25 (1929-1937)
11.	Raden Ronggo Koesnindar / Puduk Sinumpet	Bupati Madiun ke-26 (1937-1953)

Sumber: Ermawati (2019)

Seperti halnya Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Maldi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Madiun, bersama wakilnya, Inda Raya Ayu Miko Saputri, dan rombongan pejabat Pemerintah Kota Madiun, juga melakukan kunjungan ke makam para pemimpin Madiun terdahulu. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Madiun yang waktu itu telah menginjak usia ke-101 tahun pada tanggal 20 Juni 2019. Maldi menuturkan bahwa kegiatan ziarah makam tersebut bertujuan untuk mengenang para leluhur dan pendiri Madiun, sekaligus mendoakan supaya mereka yang telah berpulang dapat diterima segala amal baiknya di sisi Allah Swt., dan diampuni dosa-dosanya. Selain itu, juga berpesan kepada generasi muda agar tidak melupakan sejarah para leluhurnya tersebut. Langkah berikutnya, berhubung kedua makam kuno baik Kuncen maupun Taman yang lokasinya berada di wilayah administrasi Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun kini berupaya untuk merawat dan memberikan perhatian lebih terhadap kedua makam agar tetap terjaga esensinya (Ermawati, 2019).

Adapun lokasi ketiga yang paling sering dikunjungi para pejabat Madiun dalam agenda ziarah ke makam leluhurnya, yaitu Kompleks Makam Raja-raja Mataram di Kotagede, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sanalah Bupati Madiun kedua dimakamkan, bernama Raden Ajeng Ayu Retno Jumilah yang menjabat tahun 1586-1590, menggantikan ayahnya Ronggo Jumeno. Semua itu berawal ketika Madiun berhasil ditaklukkan oleh Mataram, kemudian Retno Jumilah yang memimpin pasukan ikut diboyong ke Mataram (Yogyakarta), dan dipersunting Panembahan Senopati. Oleh karena itu, tempat peristirahatan terakhirnya kini berada di samping makam suaminya tersebut yang termasuk dalam keluarga Raja Mataram (Siamunir, 2020).

Terakhir kali pejabat dari Madiun melakukan kunjungan ke makam tersebut, yakni ketika merayakan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-454 tahun. Ditutup dengan acara ziarah ke makam leluhur sebagai rutinitas dan usaha dalam melestarikan salah satu tradisi keagamaan dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kepala Polres Madiun, dan Komandan Kodim 0803 Madiun (Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, 2022).

Foto 3. Kunjungan Bupati Madiun beserta Jajarannya ke Makam Raja-Raja Mataram di Kotagede, Bantul



Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (2022)

Dalam proses pelestarian tradisi ziarah ke makam leluhur, terdapat kebiasaan yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat muslim di Madiun, seperti membawa pinang atau jenis tanaman dalam bahasa Jawa Kuno (Kawi) disebut "*ganten*" ke makam. Dengan maksud ingin mengenang para leluhurnya, terutama yang hidup di masa kekuasaan Mataram Islam, karena pada masa itu hampir semua adipati/bupati di sana rata-rata *menginang*, yaitu kebiasaan mengunyah bahan-bahan paduan antara daun sirih, pinang, dan kapur yang terkadang juga dicampur dengan kapur dan tembakau. Maka dari itu, untuk mengulang suatu bentuk memori agar anak cucunya nanti tidak lupa dengan sejarah, sehingga dibawalah tanaman pinang tersebut ke makam yang akan diziarahi, kemudian

ditambahkan bunga yang harum dan suruh. Di lain sisi, berusaha untuk meluruskan persepsi keliru dari sebagian masyarakat yang masih menganggapnya sebagai bentuk sesaji, padahal semua itu murni karena ingin melestarikan adat dan budaya, khususnya budaya Jawa yang sangat adiluhung (Dhevi & Widiharto, 2019).

KESIMPULAN

Tradisi ziarah makam di Madiun tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas keagamaan untuk mengirim doa, tawasul, dan tabarruk, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian budaya lokal yang terus dipertahankan oleh pejabat Muslim di daerah tersebut. Keterlibatan Bupati dan Walikota Madiun dalam kegiatan ziarah menunjukkan adanya hubungan yang erat antara agama, budaya, dan kekuasaan lokal, di mana tradisi ziarah dimanfaatkan sebagai sarana menjaga nilai historis, legitimasi simbolik, serta kedekatan emosional dengan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi agama, tradisi ini memperlihatkan bahwa praktik keagamaan lokal tetap mampu bertahan di tengah perubahan sosial modern melalui dukungan elite pemerintahan dan masyarakat setempat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian wisata religi dan sosiologi agama, khususnya dalam melihat ziarah makam bukan sekadar praktik spiritual, melainkan juga sebagai media pelestarian identitas budaya dan penguatan relasi sosial-politik di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat daerah memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi keagamaan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian mengenai respons masyarakat terhadap keterlibatan pejabat dalam tradisi ziarah, maupun perkembangan wisata religi di Madiun sebagai bagian dari identitas budaya dan potensi sosial-ekonomi daerah.

13. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lucien. "Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen. VII: De Java-Oorlog (1825-1830)." *Djâwâ: Tijdschrift van het Java-Instituut*, 20e Jaargang No. 1, Mei 1941, hlm. 226-246.
- Al-Ayyubi, M. Z., & Munif, M. (2021). Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis-Sosiologis dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Kontemporer. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1), 75-88. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2276386>
- Al-Fakir, S. (2015). *Babad Kesultanan Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram*. Demak: Galang Ideapena.
- Burke, P. (1993). *History and Social Theory*. New York: Cornell University Press.
- Chairul, A. (2019). Kearifan Lokal dalam Tradisi Mancoliak Anak pada Masyarakat Adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5(2), 172-188. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1275148>
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat: Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 75-83. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>
- Dhevi, Fitriya, & Toto Widiharto. "Madiun - Makam Pangeran Timur Bupati Pertama Madiun | Tunjung Budoyo (Eps.10 Part 1)," 17 Juni 2019. Akses 18 Oktober 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=JULp7AuzEGc>
- Ermawati, Rohmah. "Ziarah ke Makam Taman dan Kuncen Awali Perayaan HUT ke-101 Kota Madiun," 19 Juni 2019. Akses 18 Oktober 2022. <https://www.solopos.com/ziarah-ke-makam-taman-dan-kuncen-awali-perayaan-hut-ke-101-kota-madiun-999664>
- Graaf, H. J. de, & Pigeaue, Th. G. T. (1989). *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*. Terjemahan oleh Pustaka Utama Grafiti dan KITLV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Ham, O. H. (2019). *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*. Edisi Revisi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haryadi, L. F., & Safinah. (2020). Tradisi Ziarah Kubur dalam Pendekatan Sejarah. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 115–126.
- Huda, T. F. (2016). Pemanfaatan Petilasan Macan Putih sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal bagi Generasi Muda. *Historia: Jurnal Pembelajaran Sejarah dan Sejarah UM Metro*, 4(1), 53–62. <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/sejarah/article/view/482>
- Kastolani, & Yusof, A. (2016). Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(1), 51–74. <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.1.53-74>
- Latif, M., & Usman, Muh. I. (2021). Fenomena Ziarah Makam Wali dalam Masyarakat Mandar. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 19(2), 247–263. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.4975>
- Madjid, M. D., & Wahyudhi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Mahamid, M. N. L. (2022). *Karesidenan Madiun 1896-1942: Kiprah Penguasa Belanda dalam Modernisasi Administrasi hingga Perubahan Sosial-Politik*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Mahamid, M. N. L. (2023). *Politik Pendidikan Hindia Belanda: Studi Kebijakan Residen Madiun (1934-1941)*. Tesis pada Program Studi Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Margana, S., dkk. (2018). *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*. Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ma'ruf, Moh. A. (2021). Tradisi Ziarah dalam Perspektif Hadis Nabi: Living Hadis di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Darangong Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang. *Holistic Al-Hadis: Jurnal Studi Hadis, Keindonesiaan, dan Integrasi Ilmu*, 7(1), 49–68. <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i1.5289>
- Mayer, L. Th., & Moll, J. F. A. C. van. (1909). *De sēdēkaks en slamētans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten*. Semarang-Soerabaja: G.C.T van Dorp & Co. www.delpher.nl.
- Mirdad, J., Helmina, & Admizal, I. (2022). Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam yang Dikeramatkan. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 12(1), 64–79. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v12i1.643>
- Olthof, W. L. (2017). *Babad Tanah Jawi: Mulai Nabi Adam sampai Pangeran Purbaya*. Yogyakarta: Narasi.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun. (1980). *Sejarah Kabupaten Madiun*. Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Pemerintah Kabupaten Madiun. "Bupati Madiun Ziarah ke Beberapa Makam Bupati Pendahulu," 13 Juli 2020. Akses 18 Oktober 2022. <https://madiunkab.go.id/bupati-madiun-ziarah-ke-beberapa-makam-bupati-pendahulu/>
- Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. "Ziarah Makam Putri Adipati Madiun di Kota Gede Yogyakarta," 28 Juli 2020. Akses 19 Oktober 2022. <https://pn-madiunkab.go.id/ziarah-makam-putri-adipati-madiun-pertama-di-kota-gede-yogyakarta/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5072/pp-no-52-tahun-2010>

- Sari, N. I., Wajdi, F., & Narulita, S. (2018). Peningkatan Spiritualitas melalui Wisata Religi di Makam Keramat Kwitang Jakarta. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(1), 44–58.
- Sari, S. W. (2016). Pergeseran Nilai-nilai Religius Kenduri dalam Tradisi Jawa oleh Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 4(1), 1–17. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/28789/27747>
- Siamunir (72 tahun). *Juru Kunci Makam Kuno Kuncen Madiun*. Wawancara oleh Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, tanggal 24 Agustus 2020.
- Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië no. 326*. (1918). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Subri. (2017). Ziarah Makam antara Tradisi dan Praktek Kemusyrikan. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 67–87. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/edu/article/view/684>
- Sylviana, Z. (2018). Ziarah: Antara Fenomena Mistik dan Komunikasi Spiritual. *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 118–131. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.273>
- Tharaba, F. (2016). *Sosiologi Agama: Konsep, Metode, Riset, dan Konflik Sosial*. Malang: Madani.
- Triatmoko, A., & Wibowo, A. M. (2012). Cagar Budaya Masjid Kuno Kuncen sebagai Ikon Wisata Sejarah dan Religi Kota Madiun. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v2i2.1461>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950*. (1950). http://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/dok_lain/87264157-UU-No-12-Tahun-1950-Kabupaten-Di-Jatim1.pdf
- Wahid, A. N., Sumarlam, & Subiyantoro, S. (2018). Tradisi Ziarah Makam Bathara Katong: Tinjauan Deskripsi Akulturasi Budaya. *Mudra: Jurnal Seni Budaya*, 33(2), 215–222. <https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.289>
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Terjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris oleh A. M. Henderson dan T. Parsons. New York: Oxford University Press.
- Winoto, M., & Amaliyah. (2022). *Kitab Mahkota Ziaroh*. Banyumas: Pena Persada.